



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km 9 Pasuruan - Bangil, Pasuruan
Email: diskominfo@pasuruankab.go.id



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/1100/HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Agustus 2024.
Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.
3. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/1100/HK/424.013/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu kegiatan anatar unit kerja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD;
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenan.

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah Perangkat Daerah yang memiliki 3 (tiga) urusan yakni Urusan

Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan dalam membangun Kabupaten Pasuruan. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggaraan negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Perubahan Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program kegiatan serta sub kegiatan SKPD. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 tersusun mengacu pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 pada rumusan tujuan yaitu “ Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi” pada Sasaran “ Meningkatnya birokrasi yang kapabel” dengan indikator capaian “ Indeks SPBE “. Dengan demikian maka disusun perencanaan tugas dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini mengacu dan berpedoman pada RPD dan Renstra.

Selain itu Renja juga bersifat dinamis tersusun juga berdasarkan usulan-usulan yang berkembang seperti yang masuk dalam Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (PRenja) disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan No 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 bagi Dinas Kominfo untuk melaksanakan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan arah pengembangan *e-government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat dan transparan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II
Tabel 2.1 (E.81) Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Lingkup Kab.
- 2.2. Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah isu terbaru s/d Triwulan II 2024, misal : perubahan regulasi atau instruksi pemerintah pusat, kasus/kejadian luar biasa (wabah penyakit, bencana, dll), dll.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
Catatan : tampilan tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026, indikator dan target 2024 (awal dan perubahan), serta perubahan target SPM/IKK
- 3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Tabel 3.3 Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Catatan : beri penjelasan proses perubahannya, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada Bab II, penyesuaian regulasi misal : nomenklatur terkait DAK dan CUKAI Tahun 2024 atau lainnya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II

Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun berjalan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan mengampu program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Evaluasi terhadap kinerja Renja Diskominfo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2024 atau semester I. dibawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Alokasi anggaran penetapan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebesar Rp. 23.508.361.024,- dengan penyerapan anggaran pada Triwulan II sebesar Rp. 6.019.717.175,- atau 25,60%, dari keseluruhan kegiatan.

- ❖ Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Capaian kinerja keuangan masih belum memenuhi target, dan pada pelaksanaan kegiatannya masih dihadapkan beberapa permasalahan yaitu terdapatnya beberapa rencana kegiatan yang belum memenuhi target capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 triwulan II, hal itu dikarenakan pengefektifan dan pengefisienan kebutuhan. Program/kegiatan /sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja belum memenuhi target yang direncanakan di Tahun 2023 sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase konsistensi indikator kinerja program/keg/ subkeg pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi.

Target : 83,5% Realisasi : 80,3%

Pencapaian kinerja tidak tercapai dikarenakan target yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai dalam waktu yang ditetapkan dan penggunaan data yang tidak lengkap dalam proses perencanaan dan pelaporan.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target : 2 Laporan Realisasi : 0 Laporan

Pencapaian kinerja tidak tercapai dikarenakan kegiatan masih akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024, namun setiap triwulan biasanya memperoleh laporan simoneva.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah.

Target : 75% Realisasi : 46%

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan anggaran masih berjalan sampai akhir tahun 2024.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Target : 12 Laporan Realisasi : 0 Laporan

Pencapaian kinerja belum ada realisasi sampai semester I tahun anggaran 2024, dan anggaran sub keg fasilitasi kunjungan tamu direfocussing.

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indikator : Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi.

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.

Indikator : Persentase Masyarakat penerimaan informasi publik.

Target : 10% Realisasi : 3%

Pencapaian kinerja semester I masih rendah, dikarenakan ada sub kegiatan yang belum melaksanakan kegiatan, dan anggaran masih berjalan sampai akhir tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Target : 128 dokumen Realisasi : 11 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai, tetapi didalam sub kegiatan ini telah realisasi pada belanja publikasi, dan sub kegiatan ini anggaran bersumber DAU dan DBHCHT, realisasi DBHCHT terjadi permasalahan pada Berita Acara DBHCHT 4 Desember 2023 untuk Pelaksanaan DBHCHT Tahun 2024 terdapat klausul bahwa Apabila perhitungan nilai Sosialisasi sudah memenuhi 40 point, maka publikasi melalui media ditiadakan. Informasi baru Kominfo terima pada waktu Rapat verifikasi Desk DBHCHT TA. 2025 di Hotel Wydham Surabaya.

Dan kepastian diperbolehkannya untuk meralisasikan/pelaksanaan kegiatan publikasi pada bulan akhir 10 Juli 2024 setelah komunikasi via Zoom dengan DJPK Kemenkue, DTD Kemendagri, Direktorat Bea Dan Cukai Kemenkue, yang di fasilitasi oleh Biro Perekonomian Provinsi Jatim dan Bagian Organisasi,

dan Hasil akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Perubahan RKP DBHCHT TA. 2024 yang dilaksanakan di Hotel Savana Malang. Kegiatan pada sub keg ini masih proses di semester II Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

Target : 80 dokumen Realisasi : 10 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum realisasi rapat koordinasi dan pembinaan KIM, tetapi ada realisasi pada rekening pembayaran honorarium THL, kegiatan masih akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota

Target : 3 Unit Realisasi : 0 Unit

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan masih belum ada pembelian barang didalam sub kegiatan ini, tetapi ada realisasi pada rekening pembayaran frekuensi pada radio, kegiatan masih akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024.

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Indikator : - % akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo

- Nilai tata Kelola SPBE

- % layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan ruang server pemerintah

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indikator : Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Target : 100 domain Realisasi : 2 domain

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan jumlah domain pada Kabupaten Pasuruan : pasuruankab.go.id dan kabpasuruan.id, kegiatan masih berlangsung sampai di semester II Tahun 2024.

- Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Target : 2 dokumen Realisasi : 1 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan register domain/sub domain resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, jumlah domain 2 domain pada Kabupaten Pasuruan : pasuruankab.go.id dan kabpasuruan.id, kegiatan masih berlangsung sampai di semester II Tahun 2024.

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator : Jumlah Aplikasi Layanan Publik dan aplikasi khusus Perangkat Daerah yang terintegrasi.

- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerntah Berbasis Elektronik.

Indikator : Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik.

Target : 1 dokumen Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan proses pelaksanaan pekerjaan bulan Juli s/d Desember 2024 (sesuai kontrak),

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah.

Indikator : Jumlah Pusat data pementahan daerah yang dikelola

Target : 3 unit Realisasi : 0 unit

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan proses pelaksanaan pekerjaan menunggu hasil arsitektur spbe yang dalam penyusunan pada saat ini (sesuai kontrak penyusunan dokumen perencanaan spbe), menunggu selesainya ruang data center yang saat ini masih di laksanakan oleh dinas sda ck dan tr rencana realisasi bulan september s/d desember 2024.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Indikator : Jumlah dokumen hasil penyelenggaran sistem komunikasi intra pemerintah daerah

Target : 24 PD

Realisasi : 0 PD

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum diadakan kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi dengan perangkat daerah.

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Indikator : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City.

Target : 1 dokumen

Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum diadakan kegiatan rapat koordinasi.

- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Target : 1 dokumen

Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum diadakan kegiatan Bimtek TIK, tetapi ada realisasi pada honorarium THL, dan kegiatan akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024.

- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Indikator : Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Target : 1 dokumen

Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum diadakan kegiatan rapat koordinasi, dan kegiatan akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

Indikator : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE.

Target : 1 dokumen Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum diadakan kegiatan rapat koordinasi evaluasi dan monitoring SPBE, dan kegiatan akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Indikator : Persentase Data yang Berbagi Pakai

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Persentase data Sektoral yang digunakan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Target : 4 dokumen Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan proses pelaksanaan pekerjaan bulan agustus s/d desmber 2024 (sesuai kontrak) dan rencana realisasi bulan nopember s/d desember 2024, aplikasi portal satu data dalam tahap proses pengisian.

- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

Indikator : Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya SDM peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.

Target : 64 orang Realisasi : 0 orang

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan belum diadakan kegiatan bimtek statistik pada

perangkat daerah dan kegiatan akan dilaksanakan di semester II Tahun 2024.

- Membangun Metadata Statistik Sektor.

Indikator : Jumlah Metadata Statistik Sektor yang dihimpun.

Target : 1 dokumen Realisasi : 0 dokumen

Pencapaian kinerja belum tercapai dikarenakan dokumen metadata belum selesai, dan masih proses dengan dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah.

**E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI**

Indikator : Nilai SMKI

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : persentase data yang diamankan.

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Target : 1 laporan Realisasi : 0 laporan

Pencapaian kinerja belum tercapai, tetapi ada realisasi pada belanja ATK dan Bahan Komputer untuk mendukung laporan dan dokumen pada sub kegiatan ini dan kegiatan masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Target : 1 laporan Realisasi : 0 laporan

Pencapaian kinerja belum tercapai, tetapi ada realisasi pada belanja BBM untuk mendukung laporan dan dokumen pada sub kegiatan ini dan

kegiatan masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- ❖ Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari tabel 2.1 tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja yang telah memenuhi target capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 triwulan II adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi .

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Target : 9 dokumen Realisasi : 9 dokumen

Pencapaian kinerja telah tercapai pada pelaksanaan kegiatan forum PD, penyusunan dokumen perencanaan yang ada pada PD dalam semester I dan sisa anggaran sub kegiatan ini di refocusing.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase laporan keuangan yang sesuai denn ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target : 30 org/bln Realisasi : 27 org/bln

Pencapaian kinerja telah tercapai, perncapaian kinerja berdasarkan beberapa faktor yaitu : capaian kinerja di evaluasi melalui SAKIP, Tunjangan Kinerja yang berhasil memenuhi target capaian renstra biasanya menerima TPP sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian PD, Penilaian Kinerja dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu yang telah

ditetapkan dalam renstra dan penganggaran untuk gaji dan tunjang ASN jika mencapai target kinerja maka tunjangan kinerja akan diberikan sesuai aturan berlaku. Dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target : 12 dokumen Realisasi : 6 dokumen

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, pelaksanaan dalam pembayaran honorarium PTT dan THL di Dinas Kominfo dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target : 15 paket Realisasi : 8 paket

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target : 15 paket Realisasi : 8 paket

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

Target : 4 paket Realisasi : 2 paket

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan

Target : 1 paket Realisasi : 1 paket

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target : 12 laporan Realisasi : 6 laporan

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase pengadaan BMD yang terealisasi

- Pengadaan Mebel

Indikator : Jumlah Paket Mebel yang disediakan

Target : 2 unit Realisasi : 2 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan pembelian pengadaan mebelair pada Dinas Kominfo telah terlaksana semua.

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan

Target : 1 unit Realisasi : 1 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan pembelian peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Kominfo telah terlaksana semua.

- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target : 12 laporan Realisasi : 6 laporan

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, pada pembayaran Listrik radio, command center, video tron depan kompleks perkantoran raci dan telp, rencana pada PAK akan ada tambahan anggaran untuk pembayaran Listrik untuk 2 vidoetron yang ada di masjid chenghoo Pandaan dan bundaran Gempol, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan

Target : 12 laporan Realisasi : 6 laporan

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, pada pembayaran honor pengelolaan keuangan, pejabat pengadaan dan honor THL kebersihan, keamanan dan sopir, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Target : 8 unit Realisasi : 3 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dan telah dilaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas Kominfo, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Pemeliharaan Mebel

Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara

Target : 10 unit Realisasi : 10 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dan dilaksanakan dalam semester I, dengan pemeliharaan mebel yang

ada pada ruangan Kepala Dinas dan sofa yang ada di ruang tunggu Commad Center.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Target : 10 unit Realisasi : 5 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dalam pemeliharaan computer, printer dan alat mesin lainnya, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Target : 2 unit Realisasi : 2 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dalam pelaksanaan pindahan kantor Dinas Kominfo pada bulan februari – maret 2024.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Target : 13 unit Realisasi : 5 unit

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dalam pemeliharaan genset dan AC di Dinas Kominfo Kab. Pasuruan, sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indikator : Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Masyarakat Penerimaan Informasi Publik

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Target : 60 dokumen Realisasi : 27 dokumen

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dengan pelaksanaan liputan dan laporan hasil liputan, sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Indikator : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Target : 12 dokumen Realisasi : 9 dokumen

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I, dengan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan acara (pertunjukan rakyat) dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Indikator : - % akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo

- Nilai tata Kelola SPBE

- % layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan ruang server pemerintah

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Target : 65 PD Realisasi : 55 PD

Pencapaian kinerja tercapai dikarenakan jumlah layanan jaringan internet yang disediakan Kominfo ada 2 jaringan yaitu Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah (Gedung Maslahat dan Lingkungan Pendopo), layanan jaringan internet da 55 perangkat daerah dan 80 titik dan kegiatan masih berlangsung sampai di semester II Tahun 2024.

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator : Jumlah Aplikasi Layanan Publik dan aplikasi khusus Perangkat Daerah yang terintegrasi.

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indikator : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Target : 23 unit Realisasi : 10 unit

Pencapaian kinerja belum tercapai tetapi proses pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan telah berjalan, dengan pembayaran jasa konversi aplikasi/sistem informasi untuk pengembangan dan sinkronisasi aplikasi pemda, dan kegiatan masih berjalan sampai semester II tahun 2024.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Target : 65 PD Realisasi : 55 PD

Pencapaian kinerja telah tercapai dalam semester I dengan pembelian perpanjangan lisensi firewall untuk keamanan informasi, dan sub kegiatan ini masih berjalan sampai di semester II Tahun 2024.

- ❖ Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Belum ada sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Triwulan II tahun 2024.

- ❖ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

- Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :

- Alokasi anggaran yang bersumber DBHCHT penyerapannya menunggu setelah di sahkan oleh Propinsi;

- Terbatasnya sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja;
- Adanya refocusing anggaran seluruh Perangkat Daerah se – Kabupaten Pasuruan;
- Pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan;
- Terjadi pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan ke triwulan III tahun 2024;
- Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.
- Faktor yang menjadi penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah nihil.

❖ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan dibidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung implementasi e-government, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi, serta peningkatan keamanan informasinya.

❖ Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang mendukung sistem kerja yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya, antara lain :

- a. integrasi sistem informasi manajemen pada masing-masing OPD, peningkatan pembangunan infrastruktur TIK, pembangunan keamanan informasi, penyediaan satu data statistik, dan peningkatan komunikasi dan informasi publik;

- b. pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
- c. pergeseran anggaran antar kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.
- d. Mengoptimalkan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang ada seefisien mungkin.
- e. Pengusulan tambahan anggaran pada Program/ Kegiatan yang dirasa anggarannya masih kurang, untuk mengejar ketetinggalan target yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi program kegiatan yang telah berjalan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan hambatan yang ada guna menentukan solusi atau penyelesaiannya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada **Tabel 2.1.** berikut ini :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :
IKU PD : "Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik"
Target : 2,5

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	83,5 %	6.339.998.206	0	1.367.128.479	80,3 0%	1.822.746.405	0	0	0	0	80,30 %	3.094.456.290	11,471	442.065.184	80,30 %	3.094.456.290	16,06	60.675.614

		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi		83,5 %	118.440.100	0	6.842.000	80,30%	12.000.000	0	0	0	0	80,30%	18.842.000	11,471	2.691.714	80,30%	18.842.000	16,06	3.768.400
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dok	30.775.000	5 dok	6.842.000	4 dok	12.000.000	0	0	0	0	9 dok	18.842.000	1	2.691.714	9 dok	18.842.000	1,8	3.768.400	
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	87.665.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	-		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100 %	4.817.435.286	25%	987.761.320	25%	1.323.119.427	0	0	0	0	50%	2.310.880.747	7	330.125.821	50%	2.310.880.747	10	462.176.149
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	4.547.250.294	30 org/bln	925.410.843	30 org/bln	1.260.849.555	0	0	0	0	30 org/bln	2.186.260.398	4	312.322.914	30 org/bln	2.186.260.398	6	437.252.080	
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	270.184.992	3 dok	62.350.477	3 dok	62.269.872	0	0	0	0	6 dok	124.620.349	1	17.802.907	6 dok	124.620.349	1,2	24.924.070	
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% pemenuhan kebutuhan umum PD		75%	272.868.500	27%	75.978.171	19%	52.697.296	0	0	0	0	46%	128.675.467	7	18.382.210	46%	128.675.467	9,2	25.735.093
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	4.050.000	4 paket	1.230.000	4 paket	1.199.000	0	0	0	0	8 paket	2.429.000	1	347.000	8 paket	2.429.000	1,6	485.800	

		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 pake t	7.647.680	4 pake t	2.448.500	4 pake t	2.036.000	0	0	0	0	8 paket	4.484.500	1	640.643	8 paket	4.484.500	1,6	896.900
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 pake t	32.449.820	1 pake t	9.909.990	1 pake t	8.559.800	0	0	0	0	2 paket	18.469.790	0	2.638.541	2 paket	18.469.790	0,4	3.693.958
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 pake t	6.381.000	1 pake t	1.097.500	1 pake t	3.283.500	0	0	0	0	1 paket	4.381.000	0	625.857	1 paket	4.381.000	0,2	876.200
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	-
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	214.780.000	3 laporan	61.292.181	3 laporan	37.618.996	0	0	0	0	6 laporan	98.911.177	1	14.130.168	6 laporan	98.911.177	1,2	19.782.235
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% pengadaan BMD yang terealisasi	50%	214.680.270	0	0	48%	203.358.500	0	0	0	0	48%	203.358.500	7	29.051.214	48%	203.358.500	9,6	40.671.700
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	169.929.510	0	0	1 unit	164.248.500	0	0	0	0	1 unit	164.248.500	0	23.464.071	1 unit	164.248.500	0,2	32.849.700
		2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	44.750.760	0	0	2 unit	39.110.000	0	0	0	0	2 unit	39.110.000	0	5.587.143	2 unit	39.110.000	0,4	7.822.000
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	463.690.000	25%	95.418.594	25%	99.479.582	0	0	0	0	50%	194.898.176	7	27.842.597	50%	194.898.176	10	38.979.635

		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	274.990.000	3 laporan	62.523.594	3 laporan	66.584.582	0	0	0	0	6 laporan	129.108.176	1	18.444.025	6 laporan	129.108.176	1,2	25.821.635
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	12 laporan	188.700.000	3 laporan	32.895.000	3 laporan	32.895.000	0	0	0	0	6 laporan	65.790.000	1	9.398.571	6 laporan	65.790.000	1,2	13.158.000
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	80%	452.884.050	23%	105.709.800	29%	132.091.600	0	0	0	0	52%	237.801.400	7	33.971.629	52%	237.801.400	10,4	47.560.280
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	334.221.550	2 unit	93.229.800	1 unit	77.345.100	0	0	0	0	3 unit	170.574.900	0	24.367.843	3 unit	170.574.900	0,6	34.114.980
		2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	59.070.000	2 unit	7.500.000	3 unit	9.400.000	0	0	0	0	5 unit	16.900.000	1	2.414.286	5 unit	16.900.000	1	3.380.000
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	17.685.000	3 unit	4.980.000	2 unit	3.810.000	0	0	0	0	5 unit	8.790.000	1	1.255.714	5 unit	8.790.000	1	1.758.000
		4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	5.000.000	0	0	10 unit	4.629.000	0	0	0	0	10 unit	4.629.000	1	661.286	10 unit	4.629.000	2	925.800

			5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2 unit	36.907.500	0	0	2 unit	36.907.500	0	0	0	0	2 unit	36.907.500	0	5.272.500	2 unit	36.907.500	0,4	7.381.500
	Meningkatnya Pengelolaan SPBE	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi (%)	10%	7.160.270.830	1%	442.577.750	2%	1.258.761.648	0	0	0	0	3%	1.701.339.398	0	243.048.485	3%	1.701.339.398	0,6	340.267.880
		1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Masyarakat Penerimaan Informasi Publik	10%	7.160.270.830	1%	442.577.750	2%	1.258.761.648	0	0	0	0	3%	1.701.339.398	0	243.048.485	3%	1.701.339.398	0,6	340.267.880
			1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	60 Dokumen	472.237.200	15 dokumen	118.353.100	12 dokumen	107.342.548	0	0	0	0	27 dokumen	225.695.648	4	32.242.235	27 dokumen	225.695.648	5,4	45.139.130
			2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	128 Dokumen	3.848.573.200	5 dokumen	60.484.650	6 dokumen	68.974.100	0	0	0	0	11 dokumen	129.458.750	2	18.494.107	11 dokumen	129.458.750	2,2	25.891.750
			3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	80 Dokumen	562.589.000	5 dokumen	32.610.000	5 dokumen	32.610.000	0	0	0	0	10 dokumen	65.220.000	1	9.317.143	10 dokumen	65.220.000	2	13.044.000
			4	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	2.176.700.500	4 dokumen	225.254.000	5 dokumen	1.049.835.000	0	0	0	0	9 dokumen	1.275.089.000	1	182.155.571	9 dokumen	1.275.089.000	1,8	255.017.800

			5	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	100.170.930	0 unit	5.876.000	0 unit	0	0	0	0	0 unit	5.876.000	1	839.429	0 unit	5.876.000	0	1.175.200	
	Meningkatnya Pengelolan SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			% akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56,92 %	1.284.112.372	1%	110.749.400	2,64 %	338.154.500	0	0	0	0	3,64%	448.903.900	1	64.129.129	3,64%	448.903.900	0,728	89.780.780
		1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan ruang server pemerintah	56,92 %	1.284.112.372	42%	110.749.400	49,6 %	338.154.500	0	0	0	0	91,6%	448.903.900	13	64.129.129	91,6%	448.903.900	18,32	89.780.780
			1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	100 domain	12.810.000	1 domain	0	1 domain	0	0	0	0	2 domain	-	0	-	2 domain	-	0,4	-	
			2	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ko	2 dokumen	4.660.000	1 dokumen	1.180.000	0	0	0	0	0	1 domain	1.180.000	0	168.571	1 domain	1.180.000	0,2	236.000	

					ta																		
			3	Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	65 PD	1.266.642.372	27 PD	109.569.400	28 PD	338.154.500	0	0	0	0	55 PD	447.723.900	8	63.960.557	55 PD	447.723.900	11	89.544.780
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Nilai Tata Kelola SPBE	Level 1 Terkelola	6.999.202.000	0	12.180.000	0	14.680.000	0	0	0	0	0	26.860.000	-	3.837.143	0	26.860.000	0	5.372.000
				% Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12,66	495.142.150	0	64.025.557	0	74.680.230	0	0	0	0	0	138.705.787	-	19.815.112	0	138.705.787	0	27.741.157	
		2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Layanan Publik dan aplikasi khusus Perangkat Daerah yang terintegrasi	12,66	7.494.344.150	0	76.205.557	0	89.360.230	0	0	0	0	0	165.565.787	-	23.652.255	0	165.565.787	0	33.113.157
			1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan bebrbasis elektronik (dokumen)	1 dok	771.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	-	
			2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data pementahan daerah yang dikelola	3 unit	6.180.214.000	0	12.180.000	0	12.180.000	0	0	0	0	0	24.360.000	-	3.480.000	0	24.360.000	0	4.872.000
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah dokumen hasil penyelenggaran sistem komunikasi intra pemerintah daerah	24 PD	10.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	-	

		4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	23 unit	358.275.650	5 unit	54.065.557	5 unit	62.220.230	0	0	0	0	10 unit	116.285.787	1	16.612.255	10 unit	116.285.787	2	23.257.157
		5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (dokumen)	1 dok	24.979.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	-	142.857	0	1.000.000	0	200.000
		6	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 dok	93.392.500	0	9.960.000	0	11.460.000	0	0	0	0	0	21.420.000	-	3.060.000	0	21.420.000	0	4.284.000
		7	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (dokumen)	1 dok	18.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	-
		8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 dok	37.173.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	-	357.143	0	2.500.000	0	500.000
	Meningkatnya Pengelolaan SPBE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		% Data yang Berbagi Pakai	80%	490.000.000	0	1.801.800	0	5.060.000	0	0	0	0	0	6.861.800	-	980.257	0	6.861.800	0	1.372.360

		1	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% data Sektoral yang digunakan	80%	490.00 0.000	0	1.801. 800	0	5.060.0 00	0	0	0	0	0	6.861 .800	-	980.25 7	0	6.861.8 00	0	1.372. 360
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dok	387.138 .000	0	1.311.8 00	0	3.000.0 00	0	0	0	0	0	4.311. 800	-	615.97 1	0	4.311.8 00	0	862.36 0
		2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya SDM peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	64 oran g	50.000. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-
		3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 dok	52.862. 000	0	490.00 0	0	2.060.0 00	0	0	0	0	0	2.550. 000	-	364.28 6	0	2.550.0 00	0	510.00 0
	Mening katnya Pengelo laan SPBE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai SMKI	Leve l cuk up baik	739.63 5.466	0	596.61 0.000	0	5.980.0 00	0	0	0	0	0	602.5 90.00 0	-	86.084 .286	0	602.59 0.000	0	120.5 18.00 0
		1	Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Data yang Teramankan	20%	739.63 5.466	10,8 8%	596.61 0.000	0	5.980.0 00	0	0	0	0	10, 88 %	602.5 90.00 0	2	86.084. 286	10, 88 %	602.59 0.000	2, 17 6	120.5 18.00 0

			1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi (perangkat daerah)	65 PD	732.447.266	55 PD	596.020.000	0	4.980.000	0	0	0	0	55 PD	601.000.000	8	85.857.143	55 PD	601.000.000	11	120.200.000
			2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	2.120.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	-	84.286	0	590.000	0	118.000	
			3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	5.068.200	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	-	142.857	0	1.000.000	0	200.000	
	JUMLAH ANGGARAN						23.508.361.024		2.595.072.986		3.520.062.783		0		0		6.019.717.175						

2.2 Isu - isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, adapun permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekosistem SPBE belum terkelola dengan baik;
2. Pemanfaatan TIK Pemerintah Daerah belum optimal;
3. Komunikasi dan Informasi Publik belum efektif dan terorganisir dengan baik;
4. Tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik belum terintegrasi dengan baik;
5. Akses Informasi masih belum merata sampai ke seluruh desa;
6. Tata kelola data belum terpadu dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019);
7. Satu data Kabupaten Pasuruan belum terbangun;
8. Pembangunan metadata statistik sektoral belum optimal;
9. Peningkatan risiko dan celah keamanan informasi dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (penyelenggaraan SPBE) Pemerintah Daerah sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era siber;
10. Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum terkelola dengan baik;
11. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan; dan
12. Kinerja Layanan Manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomo 157 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas di Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi,

utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga beberapa peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika perlu berperan dalam mengembangkan sistem e-government yang memadai dengan berbagi pakai data dan terintegrasi serta aman dan menjaga pemberitaan positif akan kebijakan pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah, terjamin dan aman oleh masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan Smart City. Salah satu tugas Dinas Kominfo yang menjadi pendukung skala prioritas pembangunan pada tahun 2024 merupakan Peningkatan Indeks SPBE dan mewujudkan satu data daerah.

Namun seperti pada umumnya masih terdapat beberapa permasalahan dalam rangka meningkatkan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Portal Satu Data antara lain :

- 1 Kurangnya kebijakan dan pedoman terkait dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk mendukung kebijakan dan prioritas daerah.
- 2 Masih banyak aplikasi - aplikasi yang dibangun Perangkat Daerah tapi tidak saling terhubung dan berangan serta banyak duplikasi data.
- 3 Masih minimnya ketersediaan data sektoral dan kualitas akurasi data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan sehingga pemanfaatan data daerah oleh perangkat daerah minim.
- 4 Tingginya tingkat kerentanan kebocoran data yang bersumber dari aplikasi atau network.
- 5 Belum Standartnya ruang pusat data daerah/ruang komputasi daerah/ruang server daerah sehingga resiko kerusakan dan trouble tidak bisa dihindari.
- 6 Belum semua perangkat daerah terhubung dalam jaringan intra pemerintah / jaringan tertutup/jaringan intranet daerah.
- 7 Minimnya SDM yang berkompeten di bidang Pembangunan Aplikasi, Jaringan Intra Pemerintah, Persandian/Cyber dan Statistik
- 8 Minimnya desiminasi yang dilakukan oleh dinas.
- 9 Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai, telah dilakukan upaya perbaikan setiap tahunnya, contoh pada ruang data center memerlukan tempat yang besar namun kenyataannya tidak demikian.

Dalam mewujudkan pemenuhan target peningkatan Indeks SPBE dan mewujudkan portal satu data diperlukan :

1. Melakukan penyusunan dokumen Perencanaan SPBE dengan mengacu pada RPD dan menyusun kebijakan daerahnya.
2. Rekrutmen SDM Teknis Profesional secara terbuka (Teknis Pembangunan Aplikasi, Teknis Data Center dan Keamanan Cyber)
3. Konsolidasi Aplikasi yang dibangun mandiri atau oleh Dinas untuk mendukung Integrasi Aplikasi dengan Portal Satu Data Meningkatkan Keamanan Informasi (Firewall Server dan Jaringan)
4. Meningkatkan Requirement Infrastruktur Pusat Komputasi Data Daerah.
5. Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik.
6. Peningkatan Layanan Jaringan Intra pemerintah di Perangkat Daerah di Lingkungan Komplek Perkantoran Raci dengan Super Prioritas Sekretariat Daerah Gedung Maslahat.
7. Menghubungkan Network Server Perangkat Daerah dalam Jaringan Intra Pemerintah.
8. Memberikan Layanan VPN untuk keterhubungan Aplikasi Client ke Ruang Server.
9. Peningkatan Peran CSIRT Daerah.
10. Peningkatan SDM (Teknis Pembangunan Aplikasi, Teknis Data Center dan Keamanan Cyber)
11. Pengaturan kebijakan dan standar terkait etika penggunaan, penyebaran, dan pengelolaan konten digital agar tidak melanggar hukum dan etika.
12. Meningkatkan Frekuensi Publikasi dan Diseminasi Informasi terkait kebijakan dan program prioritas daerah kepada masyarakat dengan mengaktifkan peran KKD dan KIM.

Dalam pemenuhan tugas dinas sebagaimana disampaikan point - point diatas, dengan tujuan untuk meningkatkan indek SPBE dari kurang menjadi Baik dan dapat mengimplementasikan Tahap Awal Portal Satu Data Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan tujuan yang penting.

Adapun Isu Strategis Dinas Kominfo Adalah :

- a. Menjadi Dinas utama dalam pemenuhan indikator Tujuan Daerah yaitu “ Indek SPBE”

- b. Larangan untuk pembangunan Aplikasi - aplikasi Baru
- c. Dorongan untuk penerapan interoperabilitas antar aplikasi yang ada
- d. Dorongan mewujudkan portal layanan administrasi pemerintah dengan menerapkan SSO-SA-DS-GSBus untuk Mewujudkan Portal Satu Data Digital Daerah.
- e. Keamanan Data Cyber (mencegah kebocoran data)
- f. Keamanan Informasi (isu- isu miring tentang pemerintah daerah/Hoax)
- g. Kebutuhan Aplikasi dan keamanan data cyber Pilkada tahun 2024.
- h. Dorongan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk memaksimalkan KKD
- i. Dorongan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peran CSIRT

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan adalah “ **Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah.**” (RPD) Tahun 2024-2026. Sebagai upaya untuk mendukung tema RKPD dan mendukung pencapaian indikator keberhasilan pada RPD Tahun 2024-2026, maka telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan yaitu Indeks SPBE yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang semakin cepat membuat beberapa perubahan dinamika dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan salah satunya dengan Rencana Aksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Untuk menuju Pasuruan Smart City, Kabupaten Pasuruan menjalankan proses transformasi pada 5 (lima) dimensi Pasuruan Smart City yaitu: Smart Governance, Smart Culture, Smart Living, Smart Environment dan Smart Society.

Salah satu dimensi Smart Governance yang dalam implementasinya dimaknai menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Peralihan tata kelola pemerintah menuju era digital berpotensi menimbulkan ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Inovasi-inovasi baru juga

bermunculan pada era digital, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respon dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya. Pelaksanaan E-government juga harus didukung dengan sistem pengamanan informasi, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas berita atau dokumen pemerintah merupakan hal penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan bergantung atas dukungan penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Tupoksinya Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan.

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sesuai Renstra Tahun 2024-2026, indikator dan target 2024 serta perubahan target SPM/IKK selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 3.1**

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

No	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan PD : Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik						
1	Indikator : Indek Tata Kelola dan Layanan	IKU	-	2,47	2,5	2,5	
	Sasaran PD : Meningkat nya Pengelolaan SPBE						
2	Indikator : Level Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	IKU	-	cukup	Level Terkelola	Level Terkelola	
	Sasaran PD : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	IKU	-	80,1	83,5	83,5	
	Indikator SPM/IKK						
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						

3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	IKK	%	100	58,209	58,209	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	IKK	%	100	38,5714	38,5714	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKK	%	143,58	17,126	17,126	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	IKK	%	100	59,7	59,7	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	IKK	%	100	61,54	61,54	

	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	IKK	%	49,923	48,3721	48,3721	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pada tahun 2024 mempunyai lima (5) Program, sebelas (11) kegiatan dan empat puluh satu (41) sub kegiatan. Rekapitulasi Program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.1. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Indikatif :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- o Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- o Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

- o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- o Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- o Penyediaan bahan logistik Kantor
- o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- o Fasilitasi Kunjungan Tamu
- o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- o Pengadaan Mebel
- o Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- o Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- o Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- o Pemeliharaan Mebel
- o Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- o Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- o Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan Indikatif :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- o Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- o Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- o Pelayanan Informasi Publik
- o Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- o Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

c. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan Indikatif :

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- o Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten-Kota
- o Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- o Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
 - o Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - o Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - o Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - o Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - o Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - o Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Indikatif :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - o Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - o Membangun Metadata Statistik Sektoral

1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan Indikatif :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
 - o Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- o Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- o Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

3.2.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Program Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika ke dalam rencana kegiatan untuk setiap prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat enunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, perencanaan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampakj dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
- Kegiatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hal ini dapat dilihat pada **tabel 3.2.**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berdampak Berbasis Elektronik	Portal Satu Data	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	838.773.700	4.320.810.400	10 %	10 %	0	355.154.398	
2			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	838.773.700	4.320.810.400	10 %	10 %	0	355.154.398	
3			Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	472.237.200	472.237.200	60 dokumen	60 dokumen	0	225.695.648	
	4		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	366.536.500	3.848.573.200	128 dokumen	128 dokumen	0	129.458.750	
5											
6			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.636.930.022	8.636.894.022	56,92	56,92	3,64	590.869.687	
7			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.279.452.372	1.279.452.372	56,92	56,92	91,6	447.723.900	
8			Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	12.810.000	12.810.000	100 domain	100 domain	2	-	

9			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.266.642.372	1.266.642.372	65 unit	65 unit	55	447.723.900	
10			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.357.477.650	7.357.441.650	12,66	12,66	0	143.145.787	
11			Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	771.735.000	771.735.000	1 dokumen	1 dokumen	0	-	
12			Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	6.180.214.000	6.180.214.000	3 unit	3 unit	0	24.360.000	
13			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	10.080.000	10.080.000	24 PD	24 PD	0	-	
14			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	358.275.650	358.275.650	23 unit	23 unit	5	116.285.787	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	37.173.000	37.137.000	1 dokumen	1 dokumen	0	2.500.000	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	490.000.000	442.400.000	50 %	50 %	0	6.861.800	
15			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	490.000.000	442.400.000	50 %	50 %	0	6.861.800	

[illegible]

3.2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APDB dan DBHCHT Kabupaten Pasuruan.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				JMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TAR GET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1 2-8	16=13-9	17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										Pergeseran 1 + Refocusing				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan (%)	83,50%	5.404.833.841	83,50%	6.339.998.206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan (%)	83,50%	6.276.298.774	DAU		- 63.699.432	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	83,50%	28.000.000	83,50%	118.440.100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	83,50%	102.260.100	DAU		- 16.180.000	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	7 dokumen	18.500.000	9 dokumen	30.775.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	9 dokumen	20.895.000	DAU		- 9.880.000	Penghematan anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	1 dokumen	1.000.000	0	-							-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	2 dokumen	1.000.000	0	-							-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	0	-							-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.000.000	0	-							-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 laporan	3.500.000	3 laporan	87.665.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 laporan	81.365.100	DAU		- 6.300.000	

		Daerah	Daerah (laporan)						Daerah (laporan)						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	4.249.284.938	100%	4.817.435.286	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	4.798.235.286	DAU		- <i>19.200.000</i>	
		Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	4.001.064.938	30 org/bln	4.547.250.294	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	4.547.250.294	DAU		-	
		Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	248.220.000	12 dokumen	270.184.992	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	250.984.992	DAU		- <i>19.200.000</i>	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi DBHCHT (%)	0	-	0	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi DBHCHT (%)	0	-			-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan DBHCHT (kegiatan)	0	-	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan DBHCHT (kegiatan)	0	-			-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum (persen)	50%	351.559.180	50%	272.868.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum (persen)	50%	248.047.200	DAU		- 24.821.300	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an Bangunan Kantor (Paket)	15 paket	6.037.000	15 paket	4.050.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an Bangunan Kantor (Paket)	15 paket	3.469.000	DAU		- <i>581.000</i>	<i>Penghematan anggaran</i>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15 paket	15.150.000	15 paket	7.647.680	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15 paket	6.603.180	DAU		- <i>1.044.500</i>	<i>Penghematan anggaran</i>

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30 paket	50.550.500	4 paket	32.449.820	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket	32.449.820	DAU		-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 paket	4.044.000	1 paket	6.381.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 paket	7.135.200	DAU		754.200	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.080.000	12 laporan	7.560.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.410.000	DAU		- 3.150.000	Penghematan anggaran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	150 laporan	265.697.680	12 laporan	214.780.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12 laporan	193.980.000	DAU		- 20.800.000	Penghematan anggaran
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	40%	30.000.000	40%	214.680.270	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	40%	275.988.138	DAU		61.307.868	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	25.000.000	2 unit	169.929.510	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	201.496.578	DAU		31.567.068	Penghematan anggaran
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5.000.000	2 unit	44.750.760	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	74.491.560	DAU		29.740.800	Penghematan anggaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	391.555.723	100%	463.690.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100%	412.930.000	DAU		- 50.760.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	222.115.723	12 laporan	274.990.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	274.990.000	DAU		-	

			yang Disediakan (laporan)						yang Disediakan (laporan)						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	169.440.000	12 laporan	188.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	137.940.000	DAU		- 50.760.000	
		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Unit)	80%	354.434.000	80%	452.884.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Unit)	80%	438.838.050	DAU		- 14.046.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8 unit	334.149.000	8 unit	334.221.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8 unit	302.829.550	DAU		- 31.392.000	Penghematan anggaran
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10 unit	5.000.000	DAU		-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 unit	5.285.000	10 unit	17.685.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 unit	18.831.000	DAU		1.146.000	
		Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	13 unit	10.000.000	13 unit	59.070.000	Pemeliharaan/Rehab ilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	13 unit	30.270.000	DAU		- 28.800.000	

		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	0	-	2 unit	36.907.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2 unit	81.907.500	DAU		45.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerimaan Informasi Publik (%)	10 %	2.243.994.300	10%	3.678.234.130	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerimaan Informasi Publik (%)	10%	7.091.520.830	DAU - DBH CHT		3.413.286.700	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan (Informasi)	10 %	2.243.994.300	10%	3.678.234.130	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan (Informasi)	10%	7.091.520.830	DAU - DBH CHT		3.413.286.700	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	48 dokumen	485.236.300	60 dokumen	472.237.200	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	60 dokumen	472.237.200	DAU		-	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	90 dokumen	484.900.000	128 dokumen	366.536.500	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	128 dokumen	3.800.573.200	DAU - DBH CHT		3.434.036.700	Penambahan pada DBHCHT
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)	5 dokumen	421.358.000	80 dokumen	562.589.000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)	80 dokumen	541.839.000	DAU		- 20.750.000	Penghematan anggaran

		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	12 dokumen	752.500.000	12 dokumen	2.176.700.500	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	12 dokumen	2.176.700.500	DAU		-	
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (unit)	12 dokumen	100.000.000	3 unit	100.170.930	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (unit)	3 unit	100.170.930	DAU		-	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	% akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56,92%	2.589.952.875	56,92%	8.778.456.522	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	% akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56,92%	8.547.851.210	DAU - DBH CHT		- 230.605.312	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% perangkat daerah yang menggunakan layanan ruang server pemerintah	56,92%	1.689.738.275	56,92%	1.284.112.372	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% perangkat daerah yang menggunakan layanan ruang server pemerintah	56,92%	1.108.107.060	DAU		- 176.005.312	
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (domain/subdomain)	30 domain	61.317.500	100 domain	12.810.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (domain/subdomain)	100 domain	12.810.000	DAU		-	

		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	55 unit	1.628.420.775	65 unit	1.266.642.372	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah)	65 unit	1.090.637.060	DAU		- 176.005.312	Penghematan anggaran
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0 dokumen	4.660.000	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	0 dokumen	4.660.000	DAU		-	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang terintegrasi	12,66%	900.214.600	12,66%	7.494.344.150	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang terintegrasi	12,66%	7.439.744.150	DAU - DBH CHT		- 54.600.000	
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan bebrbasis elektronik (dokumen)	2 dokumen	400.000.000	1 dokumen	771.735.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan bebrbasis elektronik (dokumen)	1 dokumen	771.735.000	DAU - DBH CHT		-	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Aplikasi)	20 sistem aplikasi	355.129.600	23 unit	358.275.650	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Aplikasi)	23 unit	316.275.650	DAU		- 42.000.000	Penghematan anggaran

		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (dokumen)	1 dokumen	8.385.000	1 dokumen	24.979.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (dokumen)	1 dokumen	17.419.000	DAU		- 7.560.000	Penghematan anggaran
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	93.392.500	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1 dokumen	93.392.500	DAU		-	
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (dokumen)	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	18.495.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (dokumen)	1 dokumen	18.495.000	DAU		-	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	11.700.000	1 dokumen	37.173.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	37.173.000	DAU		-	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				0 unit	6.180.214.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	0 unit	6.180.214.000	DBH CHT		-	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				0 PD	10.080.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	0 PD	5.040.000	DAU		- 5.040.000	Penghematan anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	% Data yang berbagi pakai	50 %	160.208.340	50 %	490.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	% Data yang berbagi pakai	50 %	490.000.000	DAU		-	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% data sektoral yang digunakan	50 %	160.208.340	50 %	490.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% data sektoral yang digunakan	50 %	490.000.000	DAU		-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	1 dokumen	100.000.000	4 dokumen	387.138.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	4 dokumen	387.138.000	DAU		-	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (dokumen)	1 dokumen	60.208.340	1 dokumen	52.862.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (dokumen)	1 dokumen	52.862.000	DAU		-	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik				64 orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya SDM peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	64 orang	50.000.000	DAU		-	

		Daerah yang Terintegrasi													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai SMKI	Level cukup baik	664.861.538	Level cukup baik	739.635.466	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai SMKI	Level cukup baik	707.889.466	DAU		- 31.746.000	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% data yang teramankan	15 %	664.861.538	15 %	739.635.466	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% data yang teramankan	15 %	707.889.466	DAU		- 31.746.000	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	3 PD	664.861.538	65 PD	732.447.266	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	65 PD	700.701.266	DAU		- 31.746.000	Penghematan anggaran

		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 laporan	2.120.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 laporan	2.120.000	DAU		-	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 laporan	5.068.200	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	5.068.200	DAU		-	
	TOTAL				11.063.850.894		20.026.324.324				23.113.560.280			3.087.235.956	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh pejabat dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - Melaksanakan Perubahan Renja 2024 dengan sebaik baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Pj. BUPATI PASURUAN,


ANDRIYANTO